

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Pada Bab V ini merupakan sebuah kesimpulan yang dirangkum penulis dalam sebuah penelitian karya ilmiah yang berjudul: “RESOLUSI KONFLIK ACEH: Kajian Ketidakberhasilan *Henry Dunant Centre* Dalam Penyelesaian Konflik Pemerintah Indonesia Dengan Gerakan Aceh Merdeka 2000-2004”. Kesimpulan tersebut berdasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan dan merupakan suatu jawaban atas permasalahan penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Berdasarkan permasalahan yang diajukan terdapat empat hal yang kemudian dapat dijawab melalui penelitian ini, diantaranya yaitu:

*Pertama* situasi dan kondisi di Aceh pada tahun 2000-2004 kurang begitu stabil, untuk kondisi politik sendiri di Aceh sedang dalam masa transisi, dimana sebelumnya intervensi dan tekanan begitu kuat dari pemerintah pusat, terutama pada masa DOM, dan menuju pada masa pengakomodiran kekuatan-kekuatan GAM oleh pemerintah pusat, seperti halnya kondisi politik di Aceh, kondisi keamanan pada kurun waktu 2000-2004 juga kurang stabil, hal ini disebabkan oleh aktivitas-aktivitas politik yang tidak kunjung menemukan titik temu antara pemerintah pusat dan GAM, sehingga kemudian berpengaruh juga pada kondisi keamanan, pencabutan status DOM di Aceh tidak membuat stabilitas keamanan terjaga dengan baik. Pada masa ini kekerasan-kekerasan masih tetap berlangsung baik dilakukan oleh Pihak GAM maupun oleh Tentara Indonesia.

Pihak GAM semakin berani melakukan aksi terornya terhadap tentara Indonesia dan penduduk sipil yang dianggap membantu tentara Indonesia ketika masa DOM, pembunuhan, perkosaan, pembakaran fasilitas umum serta rumah penduduk sipil Aceh marak terjadi kepada mereka yang dianggap *Cuak*, aksi ini dilakukan oleh

pihak yang tidak bertanggungjawab, mereka yang menjadi korban kemudian melakukan aksi pembalasan, tentara Indonesia sendiri tidak dapat mengontrol keamanan dengan baik, seperti ketika pada masa DOM, sehingga keamanan di Aceh semakin tidak menentu, gagalnya beberapa kesepakatan yang dirintis selama *soft power* 2000-2004 berpengaruh pada naik turunnya intensitas gesekan antara tentara Indonesia dan GAM, dengan kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil seperti ini yang paling dirugikan dan menjadi korban adalah penduduk sipil di Aceh.

Situasi politik dan keamanan yang tidak menentu pada dasarnya kemudian berpengaruh terhadap keadaan sosial di Aceh, masyarakat sipil menjadi korban, pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia semakin meningkat dan membuat beberapa pihak prihatin, terutama para aktivis dan pengiat Hak Asasi Manusia baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Trauma masyarakat Aceh selama DOM tidak dapat terobati dengan pencabutan DOM, bahkan ketika DOM selesai mereka masih trauma dengan pertunjukan kekerasan oleh tentara Indonesia dan pihak GAM.

Kehidupan ekonomi di Aceh memang masih sangat memprihatinkan, meskipun pemerintah berupaya membuka diri untuk jalan resolusi konflik Aceh dan mempersilahkan masuknya bantuan internasional namun kondisi ekonomi masih jauh dari harapan, ditetapkannya Undang-Undang No.18/2001 tentang otonomi Aceh yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga di Aceh, dalam pelaksanaannya tidak terlalu banyak membantu kehidupan ekonomi masyarakat Aceh. Semua kondisi yang masih diluar harapan ini terjadi akibat adanya konflik berkepanjangan dan belum dapat diselesaikan meskipun dengan opsi baru, dengan jalur dialog.

*Kedua* latar belakang dipilihnya *Henry Dunant Centre* oleh pemerintah pusat dan GAM untuk membantu menanganai konflik di Aceh adalah karena sebelumnya penanganan konflik Aceh oleh pemerintah pusat lebih menekankan kekuatan militer

(*hard power*) terutama pada masa orde baru, dan dengan cara itu ternyata kurang efektif dan sangat beresiko, bahkan justru semakin memperkuat perjuangan GAM, sehingga ketika masa reformasi keadaan politik Indonesia mulai berubah, sikap lunak mulai ditunjukkan oleh pemerintah pusat yang sudah mulai meninggalkan cara-cara lama dalam menyelesaikan konflik Aceh, hingga muncul opsi baru penanganan konflik Aceh pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yaitu dengan cara dialog, dimana dialog untuk menemukan kesepakatan bersama ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak dan dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator.

Pemerintah pusat sebenarnya trauma dengan keluarnya Timor-Timur dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, akibat diberikan keleluasaan untuk referendum, sehingga dalam kaitanya dengan konflik Aceh meskipun akan digunakan cara baru yaitu dengan dialog namun pemilihan pihak ketiga sangat hati-hati. Pemerintah pusat menginginkan pihak yang menengahi sebagai mediator dalam konflik Aceh ini tidak mempunyai kekuatan (*power*) untuk mengintervensi pelaksanaan dialog, selain itu pemerintah juga enggan melibatkan negara-negara lain, karena dikhawatirkan tidak bersikap netral dan bahkan membawa kepentingan pribadi negaranya.

Hingga opsi untuk memilih PBB dan ASEAN sebagai pihak ketiga dalam upaya resolusi konflik Aceh tidak direalisasikan oleh pemerintah, pemerintah trauma dengan cara PBB dalam menangani konflik Indonesia di Timor-Timur sehingga wilayah tersebut lepas dari NKRI, sedangkan jika pihak ketiga dipegang kendalinya oleh ASEAN justru yang kurang setuju adalah pihak GAM, mereka khawatir ASEAN tidak dapat bersikap netral, terutama Malaysia dan Singapura, selain itu dikhawatirkan anggota ASEAN yang nantinya ikut berpartisipasi menyelesaikan konflik Aceh, justru membawa kepentingan negara asalnya.

Munculnya opsi baru untuk memberikan kepercayaan pihak ketiga sebagai mediator jatuh pada organisasi non pemerintahan (NGO) dimana NGO ini merupakan

organisasi yang independen dan anggotanya tidak terikat dari suatu negara, selain itu tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dapat mengintervensi pemerintah pusat maupun GAM ketika menjalankan tugasnya, ada beberapa NGO baik nasional maupun internasional yang peduli terhadap konflik di Aceh, untuk NGO nasional sendiri GAM menghawatirkan, karena takut terjadi pemihakan kepada pemerintah pusat, hingga kemudian opsi terbaik untuk penanganan konflik Aceh jatuh pada NGO internasional, hal ini kemudian disambut baik oleh *Henry Dunant Centre* yang sebelumnya sudah aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan internasional, termasuk di Aceh. Sambutan baik *Henry Dunant Centre* menjadi sebuah alasan ditetapkannya mereka sebagai mediator atau penengah dalam proses resolusi konflik Aceh. Abdurahman Wahid sendiri sebagai presiden yang memberikan mandat tersebut pada *Henry Dunant Centre* dalam pidatonya di akhir tahun 1999.

*Ketiga* langkah kerja yang telah dilakukan oleh *Henry Dunant Centre* selama kurun waktu 2000-2004, pertama-tama dengan cara menumbuhkan kepercayaan (*trust*) diantara kedua belah pihak yang sedang bertikai untuk dapat maju dalam meja perundingan, kepercayaan yang dibangun ini ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan di Aceh. Tahap kedua adalah dengan cara membangun dialog-dialog yang sifatnya politis untuk mencari kesepakatan bersama dalam kepentingan masing-masing, ini dapat terlihat dari beberapa tindakan yang mereka lakukan selama menjadi mediator pemerintah pusat dan GAM, beberapa cara telah mereka lakukan diantaranya;

*Henry Dunat Centre* Merealisasasikan *Joint of Understanding for Humanitarian Pause* (Jeda Kemanusiaan) ini dilaksanakan dari Januari Sampai Desember 2000, Jeda Kemanusiaan ini tujuannya adalah untuk menghentikan kekerasan yang berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia, selain itu untu membuka kesempatan dunia internasional yang akan memberikan bantuan pada Aceh dan yang paling penting adalah untuk menumbuhkan sikap saling percaya antara pemerintah pusat dan GAM. Pasca Jeda Kemanusiaan ini dilaksanakan langkah selanjutnya

adalah membuka dialog politik pada Januari sampai April 2001, pembicaraan yang sifatnya politik ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dari pemerintah pusat dan GAM. Setelah pembicaraan politik antara pemerintah pusat dan GAM dilaksanakan selanjutnya *Henry Dunant Centre* berusaha mengikis kekuatan militer, baik dari pemerintah pusat maupun dari pihak GAM, hal ini penting dilakukan untuk mengurangi resiko-resiko pertempuran dan aksi kekerasan lainnya yang berujung pada jatuhnya korban jiwa, ini dilakukan dalam kurun waktu April sampai Desember 2001.

Karena beberapa kesepakatan dilanggar oleh kedua belah pihak dan situasi kembali memanas selanjutnya pada kurun waktu Januari sampai Mei 2002 *Henry Dunant Centre* memperbaharui dialog yang dulu sempat berantakan akibat pelanggaran dari kedua belah pihak. Pada bulan Juni sampai Desember 2002 *Henry Dunant Centre* berupaya menyusun kerangka perdamaian yang akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Kemudian karena pada kurun waktu ini pelanggaran terhadap poin-poin kesepakatan banyak terjadi dan kondisi keamanan di lapangan yang sudah mengkhawatirkan maka selanjutnya *Henry Dunant Centre* mempersiapkan pelaksanaan *Cessation Of Hostilities Agreement (COHA)* atau mungkin orang lebih mengenalnya dengan penghentian permusuhan antara pemerintah pusat dan GAM, dan yang terakhir adalah *Tokyo Joint Council* Sebelum 17 sampai 18 Mei 2003 meskipun ini merupakan inisiatif dari negara-negara donor untuk resolusi konflik Aceh tetapi *Henry Dunant Centre* ikut pula berperan dalam mempersiapkan segalanya, namun pada akhirnya pertemuan ini tidak dapat dilaksanakan karena hubungan pemerintah pusat dan GAM semakin memburuk.

*Keempat* faktor kegagalan *Henry Dunant Centre* dalam resolusi konflik Aceh dengan peranya sebagai mediator disebabkan oleh dua faktor, yaitu kurang tepatnya strategi dan lemahnya legalitas *Henry Dunant Centre*, tingginya egoisme Pemerintah Pusat dan Gerakan Aceh Merdeka. Dua faktor tersebut yang paling dominan terhadap kegagalan *Henry Dunant Centre* dalam upayanya mencari resolusi konflik Aceh.

## 5.2. Saran dan Rekomendasi

Pada proses pembelajaran di sekolah, isi penelitian yang berjudul “RESOLUSI KONFLIK ACEH; Kajian Ketidakberhasilan *Henry Dunant Centre* Dalam Penyelesaian Konflik Pemerintah Indonesia Dengan Gerakan Aceh Merdeka 2000-2004” ini dapat dikembangkan dalam mata pelajaran sejarah pada tingkat SMA/ sederajat. Rekomendasi dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas XII kurikulum 2013 kajian skripsi ini dapat menunjang Kompetensi Dasar No. 3.6 “Mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi.” 4.6 “Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.” Dengan adanya skripsi ini siswa dapat menjadikannya sebuah referensi dalam melihat kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada awal reformasi, khususnya terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam aspek politik dan ekonomi. Ketika akan dijadikan sebuah penelitian oleh siswa hubungan politik dan ekonomi di Aceh pada masa awal reformasi bisa menjadi salah satu referensinya.
2. Pada mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas XII kurikulum 2013 kajian skripsi ini dapat menunjang Kompetensi Dasar 3.8 “Mengevaluasi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan pada masa orde baru dan reformasi.” 4.8 “Merekonstruksi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan pada masa orde baru dan reformasi, menyajikan dalam bentuk tulisan.” Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memperkaya kaidah dan referensi siswa dalam proses pembelajaran sejarah peminatan kelas XII pada kurikulum 2013, materi mengenai perkembangan kehidupan politik, sosial, budaya dan ekonomi pada masa orde baru dan reformasi, siswa diharapkan dapat lebih memahami dalam kaitanya dengan integritas bangsa, dengan mencontoh

cara dialog dalam penyelesaian konflik Aceh, selain itu skripsi ini dalam pembelajaran siswa di kelas dapat menumbuhkan karakter cinta terhadap tanah air sesuai dengan tuntutan sikap siswa dalam kurikulum 2013.